

## PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

NOVANTIKO RAMADHAN  
ARWINA KARMUDIANDRI

Trisakti School of Management, Jl Siliwangi No. 74, Bekasi, Indonesia  
[novantikoramadhan@gmail.com](mailto:novantikoramadhan@gmail.com), [arwina@stietrisakti.ac.id](mailto:arwina@stietrisakti.ac.id)

Received: Februari 11, 2026; Revised: Februari 18; Accepted: Februari 19, 2026

**Abstract:** *This research aims to obtain empirical evidence on the influence of family ownership, institutional ownership, managerial ownership, and government ownership, profitability, leverage, and audit quality on Book Tax Difference (BTD). based on the premise that differences between accounting income and taxable income remain an important issue in corporate taxation and financial reporting practices. The object of this study is companies listed on the IDX, with a sample of 120 companies and a total of 435 observations selected using a purposive sampling method. The data used are secondary data obtained from companies' annual financial statements and analyzed using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS version 25. The results indicate that all independent variables simultaneously have a significant effect on Book Tax Difference, while partially profitability and leverage have a positive and significant effect on BTD, whereas family ownership, institutional ownership, managerial ownership, government ownership, and audit quality have no significant effect. These findings suggest that firm financial factors play a more dominant role in influencing the difference between accounting income and taxable income than ownership structure.*

**Keywords:** *Audit Quality, Book Tax Difference, Leverage, Ownership Structure, Profitability.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah, profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit terhadap *Book Tax Difference* (BTD). dengan latar belakang bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal masih menjadi isu penting dalam praktik perpajakan dan pelaporan keuangan perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sampel sebanyak 120 perusahaan dan total 435 observasi yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *Book Tax Difference*, sedangkan secara parsial profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap BTD, sementara kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor keuangan perusahaan lebih dominan dalam memengaruhi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dibandingkan dengan struktur kepemilikan.

**Kata kunci:** *Audit Quality, Book Tax Difference, Leverage, Ownership Structure, Profitability.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan secara hukum kepada negara tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pajak digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga manfaat yang diterima oleh wajib pajak bersifat tidak langsung meskipun pemungutannya bersifat wajib.

Sifat manfaat pajak yang tidak langsung menjadi tantangan terhadap perilaku oportunistik wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Pajak dipandang sebagai sumber pendapatan potensial bagi negara, namun bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak maksimal dan perusahaan yang berupaya meminimalkan pembayaran pajak melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa melanggar peraturan, salah satunya dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan.

Salah satu contoh praktik penghindaran pajak dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 melalui mekanisme transfer pricing. Praktik ini dilakukan dengan memindahkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan di luar negeri atau ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penghindaran pajak tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu 2009 hingga 2017 dan mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih rendah sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun, sehingga perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al. (2023) dengan melakukan pengembangan variabel independen *audit quality* yang mengacu pada penelitian

[Pandapotan et al. \(2024\)](#) serta periode pengamatan yang dilakukan yaitu pada periode 2022-2024. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh, *family ownership*, *institutional ownership*, *managerial ownership*, *government ownership*, *profitability*, *leverage*, dan *audit quality* terhadap *tax avoidance (BTD)* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun (2022-2024).

## Agency Theory

Hubungan keagenan dapat diartikan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak, yang disebut sebagai prinsipal, menunjuk pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan suatu layanan atas nama mereka, yang mencakup pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan ini bertindak untuk memaksimalkan manfaat masing-masing (*utility maximizers*), terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal ([Jensen et al., 1976](#)). Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menilai pengaruh berbagai perspektif kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

## Tax Avoidance

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang dipungut dari wajib pajak, termasuk perusahaan, untuk membiayai pengeluaran negara. Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban karena dapat mengurangi laba bersih, sehingga mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sah dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Praktik ini memberikan keuntungan bagi pemegang saham melalui peningkatan dividen serta bagi manajemen melalui peningkatan bonus kinerja akibat kenaikan laba perusahaan. Struktur kepemilikan menjadi salah satu mekanisme yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak karena berperan dalam mengurangi asimetri

informasi dan mengendalikan tindakan oportunistik manajemen, di mana kepemilikan yang terpusat dapat mendorong praktik tax avoidance sebagai strategi peningkatan profitabilitas. Penghindaran pajak dapat terindikasi menggunakan *book tax-differences (BTD)*, yang mencerminkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal akibat perbedaan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan (Arifin et al., 2023).

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan nilai *book tax-difference (BTD)* sebagaimana digunakan oleh Arifin et al. (2023). Nilai BTD yang lebih tinggi mencerminkan tingkat keterlibatan perusahaan yang lebih besar dalam praktik penghindaran pajak (Saragih et al., 2021).

#### **Family Ownership terhadap Tax Avoidance**

*Family ownership* adalah kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh satu individu atau sekelompok individu maupun perusahaan yang masih berada dalam satu keluarga atau memiliki hubungan keluarga dekat, di mana kepemilikan tersebut tidak dimiliki oleh publik, negara, atau lembaga lainnya.

Kepemilikan keluarga merupakan bentuk kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam lingkup keluarga, di mana ahli waris melanjutkan secara langsung operasional bisnis. Perusahaan dengan model kepemilikan seperti ini biasanya lebih mengutamakan perhatian terhadap biaya-biaya non-pajak, termasuk potensi biaya yang muncul akibat konflik antara pemilik dan pengelola (konflik keagenan) (Anggreini et al., 2024).

Konflik keagenan dalam perusahaan keluarga dapat memengaruhi besarnya biaya maupun manfaat yang diperoleh dari strategi penghindaran pajak. Keterlibatan pemilik keluarga memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan yang membentuk kebijakan perusahaan (Rakayana et al., 2021).

Penelitian Andriyanto et al. (2021), Rakayana et al. (2021) & Anggreini et al. (2024)

menemukan bahwa *Family Ownership* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa pihak keluarga sebagai pemegang saham utama perusahaan memiliki kontrol yang signifikan atas perusahaan. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik rent extraction melalui penghindaran pajak yang semakin besar (Gaaya et al., 2017).

Sedangkan Karlina et al. (2023) menemukan bahwa *Family Ownership* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* Perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena jika tindakan tersebut terungkap, hal itu dapat menurunkan nilai perusahaan dan merusak reputasi keluarga pemilik. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang besar umumnya berupaya untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan beban pajak yang berlaku (Karlina et al., 2023).

**H<sub>1</sub>: *Family Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

#### **Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga atau entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan investasi, maupun investor institusional lainnya. Adanya kepemilikan dari institusi-institusi tersebut dalam suatu perusahaan dapat mendorong efektivitas pengawasan dan perbaikan kinerja manajerial (Anggreini et al., 2024).

Menurut teori keagenan, pemegang saham berupaya mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan dengan menawarkan kompensasi kepada manajer sebagai bentuk penghargaan. Dalam proses peningkatan tersebut, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh, dan salah satunya adalah beban pajak yang ditanggung perusahaan (Rakayana et al., 2021).

Penelitian dari [Wulandari et al. \(2022\)](#), [Asalam et al. \(2022\)](#) & [Arifin et al. \(2023\)](#) menemukan bahwa *Institutional Ownership* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemegang saham institusional memiliki akses dan kemampuan yang memadai untuk memperoleh informasi terkait potensi keuntungan maupun kerugian dari setiap keputusan yang diambil perusahaan, oleh karena itu, mereka lebih memusatkan perhatian pada peningkatan kinerja perusahaan dan praktik penghindaran pajak ([Arifin et al., 2023](#)).

Sedangkan [Rakayana et al. \(2021\)](#), [Yusri et al. \(2022\)](#), [Ramdiani et al. \(2023\)](#) & [Prawaati et al. \(2024\)](#) hasil penelitiannya menyatakan tidak ada pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, sebagian besar investor institusional lebih menitikberatkan perhatian pada stabilitas nilai investasi serta kinerja keuangan jangka panjang, daripada pada intervensi langsung terhadap kebijakan pajak perusahaan ([Prawaati et al., 2024](#)).

## **H<sub>2</sub>: *Institutional Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **Managerial Ownership terhadap Tax Avoidance**

*Managerial Ownership* terjadi ketika manajer memiliki saham dalam struktur kepemilikan perusahaan, yang menunjukkan bahwa manajer berperan bukan hanya sebagai agen, tetapi juga sebagai prinsipal dalam perusahaan ([Arifin et al., 2023](#)).

Besarnya porsi kepemilikan saham oleh manajer mencerminkan adanya keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, manajer juga berperan sebagai prinsipal, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketika manajer memiliki saham dalam perusahaan, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Hal ini disebabkan oleh kepedulian manajer terhadap kelangsungan perusahaan, sehingga mereka tidak ingin perusahaan terkena masalah pemeriksaan

pajak. Dengan demikian, kebijakan pajak yang diambil tidak akan mengarah pada praktik penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh manajer diharapkan mampu menyatukan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga manajer lebih bijak dalam mengambil keputusan tanpa mementingkan kepentingan pribadi, guna mencegah terjadinya penghindaran pajak ([Najihah et al., 2024](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Rakayana et al. \(2021\)](#) & [Yusri et al. \(2022\)](#) hasil penelitiannya menghasilkan *managerial ownership* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal Manajer cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada reputasi pribadi mereka. Namun, di sisi lain, kepemilikan saham oleh manajer juga membuka peluang bagi mereka untuk menerapkan strategi agresivitas pajak sebagai upaya meningkatkan bonus dan dividen yang akan diterima ([Yusri et al., 2022](#)).

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh [Arifin et al. \(2023\)](#) & [Prawaati et al. \(2024\)](#) menemukan bahwa *Managerial Ownership* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. pemegang saham manajerial memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai agen dan prinsipal. Kondisi ini dapat membantu manajer untuk mengendalikan diri dari mencari keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut dapat berdampak pada penurunan nilai saham yang mereka miliki apabila kepercayaan investor lain menurun ([Arifin et al., 2023](#)).

## **H<sub>3</sub>: *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

### **Government Ownership terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan pemerintah merujuk pada situasi di mana pemerintah memegang sebagian saham dalam suatu perusahaan ([Arifin](#)

[et al., 2023](#)). Salah satu tujuan dari kepemilikan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa harga yang diterapkan perusahaan mencerminkan kepentingan sosial, sehingga operasional perusahaan berjalan dengan prinsip keadilan harga.

Dalam perspektif teori keagenan, keberadaan pemegang saham dari pemerintah tidak sepenuhnya menghilangkan potensi perilaku oportunistik dari pemegang saham pengendali. Perusahaan yang dimiliki sebagian oleh pemerintah cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh beban pajak yang lebih ringan. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang lebih erat antara pemegang saham pemerintah dan otoritas perpajakan, sehingga pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal dibandingkan perusahaan publik yang tidak memiliki keterlibatan pemerintah ([Arifin et al., 2023](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Andriyanto et al. \(2021\)](#), [Rakayana et al. \(2021\)](#) & [Wulandari et al. \(2022\)](#) hasil penelitiannya menemukan bahwa *Government Ownership* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah karena mereka dapat memanfaatkan keuntungan dari hubungan atau koneksi politik yang dimiliki. Hubungan politik tersebut memungkinkan manajemen untuk bertindak lebih agresif dalam menjalankan strategi perencanaan pajak melalui praktik penghindaran pajak ([Rakayana et al., 2021](#)).

Selain itu, hasil penelitian dari [Arifin et al. \(2023\)](#) menemukan bahwa *Government Ownership* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. keberadaan kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan dapat membuat manajer menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama terkait potensi penghindaran pajak. Namun, kehati-hatian tersebut bukan semata karena pengawasan, melainkan karena pemerintah juga memiliki harapan untuk memperoleh keuntungan dari investasinya ([Arifin et al., 2023](#)).

#### H4: *Government Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

##### **Profitability terhadap Financial Distress**

*Return On Assets* (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba secara menyeluruh. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa aset perusahaan digunakan secara efisien dalam menciptakan keuntungan bersih ([Paramita et al., 2023](#)). Menurut teori agensi, perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang melimpah, yang berdampak pada tingginya pendapatan dan laba perusahaan. Kondisi ini turut memengaruhi besarnya biaya politik yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mengelola beban pajaknya agar tidak terjadi penurunan laba yang dapat berdampak pada pengurangan kompensasi kinerja manajer sebagai agen ([Ramdiani et al., 2023](#)). Perusahaan dengan Return on Assets (ROA) yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak secara lebih cermat guna menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya atau bahkan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan, maka nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*) pun cenderung meningkat ([Paramita et al., 2023](#)).

Penelitian dari [Widyastuti et al. \(2022\)](#) & [Arifin et al. \(2023\)](#) menemukan bahwa *Profitability* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak ([Arifin et al., 2023](#)).

Selain itu, hasil penelitian dari [Ramdiani et al. \(2023\)](#) hasil penelitiannya menunjukkan tidak ada pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan berupaya menjaga kelangsungan operasionalnya dengan

menghindari praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan reputasi perusahaan ([Ramdiani et al., 2023](#)). Berdasarkan ketidakconsistenan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

**H<sub>5</sub>: Profitability berpengaruh terhadap Tax Avoidance**

#### **Leverage terhadap Tax Avoidance**

Rasio leverage merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan proporsi beban utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki ([Paramita et al., 2023](#)). Tujuan dari rasio ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan ([Widyastuti et al., 2022](#)). Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi seringkali diidentifikasi sebagai pelaku penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena beban bunga yang timbul dari pinjaman kepada pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar proporsi utang dari pihak ketiga, maka semakin besar pula beban bunga yang ditanggung. Beban bunga yang besar ini dapat menurunkan besarnya penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah akibat penurunan laba kena pajak ([Sonia et al., 2019](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Wulandari et al. \(2022\)](#), [Widyastuti et al. \(2022\)](#) & [Paramita et al. \(2023\)](#) hasil penelitiannya menemukan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak karena beban bunga atas utang dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Semakin besar jumlah utang dan biaya bunga yang ditanggung, semakin kecil beban pajak yang harus dibayar

perusahaan. Dengan demikian, peningkatan leverage menjadi salah satu strategi perusahaan untuk menghemat pajak ([Paramita et al., 2023](#)).

Selain itu, hasil penelitian dari [Firmansyah et al. \(2022\)](#) menemukan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh dalam *Tax Avoidance*. Tingginya nilai leverage menunjukkan bahwa perusahaan semakin banyak menggunakan pembiayaan dari utang pihak ketiga, yang berdampak pada meningkatnya beban bunga atas utang tersebut. Peningkatan beban bunga ini akan menurunkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan menurunnya beban pajak, perusahaan menjadi kurang terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak ([Firmansyah et al., 2022](#)).

**H<sub>6</sub>: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance**

#### **Audit Quality terhadap Tax Avoidance**

Audit yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas tinggi apabila mereka memiliki kompetensi yang baik dalam bidang akuntansi. Auditor bertugas untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran atau pelanggaran terhadap aturan dalam sistem akuntansi maupun laporan keuangan serta memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil temuan auditor disampaikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit melalui opini audit yang dipublikasikan oleh akuntan. Dengan demikian, diharapkan para pengguna laporan, termasuk investor, dapat mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang profesional dan berkompeten ([Pandapotan et al., 2024](#)).

Menurut teori keagenan, investor (prinsipal) memberikan mandat kepada manajer (agen) untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi investor. Salah satu tanggung jawab agen adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, agen juga berhak memilih auditor

yang memiliki kualifikasi tinggi untuk meminimalkan asimetri informasi serta memastikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi dan audit sehingga dapat diandalkan ([Pandapotan et al., 2024](#)).

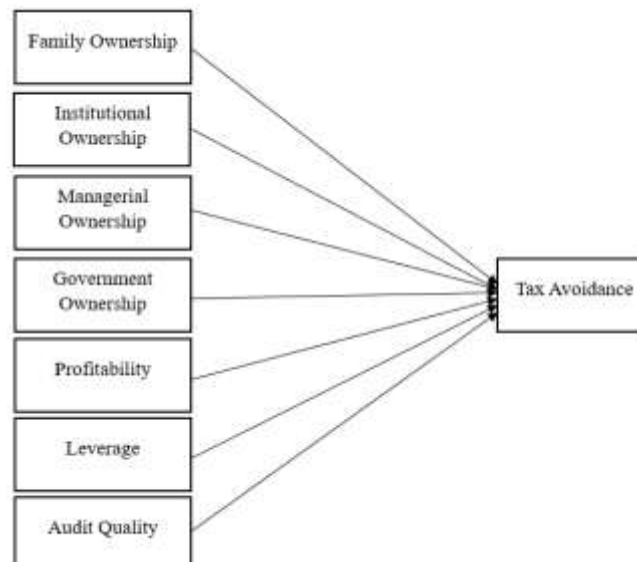
Penelitian yang dilakukan oleh [Andriyanto et al. \(2021\)](#) hasil penelitiannya menemukan bahwa *Audit Quality* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. KAP Big 4 dapat membantu perusahaan menemukan cara-cara yang sah secara hukum untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Septiya dan Novita, 2018). Namun, praktik penghindaran pajak masih mungkin terjadi dengan adanya layanan konsultasi perpajakan dari KAP Big 4. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak tetap perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan meskipun telah diaudit oleh KAP besar tersebut ([Andriyanto et al., 2021](#)).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [Pandapotan et al. \(2024\)](#), [Prawaati et al. \(2024\)](#) & [Ramdiani et al. \(2023\)](#) menemukan

bahwa *Audit Quality* tidak memiliki pengaruh dalam *Tax Avoidance*. Karena auditor yang berasal dari KAP Big Four maupun non-Big Four memiliki pedoman dan keahlian yang sama dalam melakukan audit serta memiliki kemampuan untuk mendeteksi perilaku kecurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam laporan keuangan perusahaan. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan peraturan dan standar tidak akan memengaruhi apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak, setra Auditor juga dituntut untuk mematuhi kode etik profesinya guna menjaga integritas mereka ([Pandapotan et al., 2024](#)).

#### **H7: *Audit Quality* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

Model penelitian antara variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1 Model Penelitian**

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024.	281	843
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap secara konsisten selama periode 2022 hingga 2024	(17)	(51)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember secara konsisten selama periode 2022 hingga 2024	(3)	(9)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah secara konsisten selama periode 2022 hingga 2024	(37)	(111)

Sumber: Hasil pengumpulan data

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan variabel penelitian, sehingga sampel yang diperoleh mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat.

Kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 1.

## Tax Avoidance

Untuk mengukur penghindaran pajak, digunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD) dengan mengidentifikasi perbedaan permanen antara prinsip akuntansi dan perpajakan yang dapat menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak. Nilai BTD yang lebih tinggi mencerminkan tingkat keterlibatan perusahaan yang lebih besar dalam praktik penghindaran pajak (Saraqih et al., 2021). Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini

menggunakan skala rasio *Book Tax Difference* (BTD), yaitu *Pretax Income* (penghasilan kena pajak (fiskal) perusahaan) yang di dapat dari laba sebelum pajak laporan laba rugi yang telah disesuaikan dengan *Permanent differences* dan *temporary differences*, Dikurang dengan laba sebelum pajak di laporan laba rugi dan dibagi dengan *total assets*. Proksi tersebut sama seperti yang digunakan pada penelitian oleh Arifin et al. (2023), yang menyatakan BTD dapat diperoleh dengan proksi:

$$BTD = \frac{(\text{Pretax Income} - \text{Taxable Income})}{\text{Total Asset}}$$

## Family Ownership

*Family Ownership* merujuk pada struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu, sekelompok orang, atau perusahaan yang masih berada dalam satu keluarga atau usaha keluarga dekat (Arifin et al., 2023). Persentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dengan nama keluarga yang sama diperhitungkan untuk menentukan tingkat kepemilikan keluarga (Gaaya et al., 2017). Persentase kepemilikan keluarga dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga yang

terlibat, dibandingkan dengan total saham yang beredar ([Rakayana et al., 2021](#)). Dengan proksi sebagai berikut (Arifin et al., 2023)

$$FAM = \left( \frac{\text{Family Ownership}}{\text{Outstanding Shares}} \right) \times 100\%$$

### Institutional Ownership

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh entitas non-individu, seperti lembaga atau organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan persentase saham yang dikuasai oleh investor institusional ([Arifin et al., 2023](#)) dengan proksi sebagai berikut:

$$INS = \frac{\text{Institutional Ownership}}{\text{outstanding share}} \times 100\%$$

### Managerial Ownership

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai bagian dari total saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, di mana pengukurannya didasarkan pada persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan ([Saleh et al., 2017](#)). Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar di perusahaan ([Najihah et al., 2024](#)).

Penelitian ini menggunakan proksi yang sama dengan penelitian yang dilakukan [Arifin et al. \(2023\)](#) dalam menghitung *Managerial Ownership* peneliti menggunakan skala rasio yang diproksikan sebagai berikut:

$$MAN = \left( \frac{\text{Total Shares held by Management}}{\text{Total Outstanding Shares}} \right) \times 100\%$$

### Government Ownership

Sebuah perusahaan dikategorikan memiliki kepemilikan pemerintah apabila sebagian besar sahamnya dikuasai oleh instansi atau lembaga pemerintah ([Andriyanto et al., 2021](#)). Perhitungan yang dilakukan adalah menghitung presentase kepemilikan Pemerintah dari keseluruhan saham yang ada ([Rakayana et al., 2021](#)). Dengan proksi sebagai berikut ([Arifin et al., 2023](#))

$$GOV = \left( \frac{\text{Total Shares held by Governmmnet}}{\text{Total Outstanding Shares}} \right) \times 100\%$$

### Profitability

Profitabilitas dianggap memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, karena besarnya laba yang diperoleh perusahaan menjadi dasar dalam perhitungan dan pemungutan pajak perusahaan. Untuk mengukur profitabilitas, dapat digunakan beberapa rasio keuangan, salah satunya yaitu return on assets (ROA) ([Arifin et al., 2023](#)).

$$ROA = \left( \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}} \right) \times 100\%$$

### Leverage

Rasio *leverage* mencerminkan besarnya beban utang yang ditanggung perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Peningkatan jumlah utang akan menyebabkan naiknya biaya bunga, yang pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, *leverage* dihitung menggunakan *Debt-to-Asset Ratio* (DAR) digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat leverage perusahaan, yang dihitung dengan membagi jumlah total utang dengan keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan ([Arifin et al., 2023](#)).

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

## HASIL PENELITIAN

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	435	-0,06601	0,411893	0,036333	0,059541
FAM	435	0	0,891900	0,263020	0,316046
INS	435	0	0,999960	0,715691	0,293419
MAN	435	0	0,848066	0,125037	0,216412
GOV	435	0	0,755336	0,009315	0,069699
PRO	435	0,000638	0,331943	0,078001	0,063972
LEV	435	0,022061	2,641679	0,368848	0,251421

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 Hasil Uji Frekuensi Variabel Audit Quality

Informasi	Frekuensi	Persentase
Perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big Four	282	64,8
Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four	153	35,2
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Variabel *Book Tax Difference* (BTD) memiliki nilai minimum sebesar -0,06601 yang berasal dari perusahaan Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) pada tahun 2022 dan maksimum sebesar 0,411893 yang berasal dari perusahaan PAM Mineral Tbk. (NICL) pada tahun 2022, dengan nilai rata-rata sebesar 0,036333 serta standar deviasi sebesar 0,059541.

Variabel *Family Ownership* (FAM) memiliki nilai minimum 0 yang berasal dari 194 data dan maksimum 0,891900 Trisula Textile Industries Tbk. (TRIS) pada tahun 2022, dengan nilai rata-rata sebesar 0,263020 serta standar deviasi sebesar 0,316046.

Variabel kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*) menunjukkan nilai minimum 0 yang berasal dari 5 data dan maksimum 0,999960 yang berasal dari perusahaan FAP Agri Tbk. (FAPA) pada tahun 2024, dengan nilai rata-rata sebesar 0,715691 serta standar deviasi sebesar 0,293419.

Variabel *Managerial Ownership* (MAN) memiliki nilai minimum 0 yang berasal dari 117 data dan maksimum 0,848066 yang berasal dari perusahaan Toba Surimi Industries Tbk (CRAB) 2024, dengan nilai rata-rata sebesar 0,125037 serta standar deviasi sebesar 0,216412.

Variabel *Government Ownership* (GOV) memiliki nilai minimum 0 yang berasal dari 404 data dan maksimum 0,755336 yang berasal dari perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) 2022, dengan nilai rata-rata sebesar 0,009315 serta standar deviasi sebesar 0,069699.

Variabel *Profitability* (PRO) memiliki nilai minimum sebesar 0,000638 yang berasal dari perusahaan Gema Grahasarana Tbk. (GEMA) 2022 dan maksimum sebesar 0,331943 yang berasal dari perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) 2024, dengan nilai rata-rata sebesar 0,078001 serta standar deviasi sebesar 0,063972.

Variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai minimum sebesar 0,022061 yang berasal dari perusahaan Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) 2024 dan maksimum sebesar 2,641679 yang berasal dari perusahaan Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) 2024, dengan nilai rata-rata sebesar 0,368848 serta standar deviasi sebesar 0,251421.

Pada tabel 3, Variabel Audit Quality (AQ) dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 menunjukkan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four, sedangkan nilai 0

menunjukkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big Four. Berdasarkan tabel 3, dari total 435 observasi, terdapat 153 observasi (35,2%) yang diaudit oleh KAP Big Four (AQ = 1), sedangkan 282 observasi (64,8%) diaudit oleh KAP non-Big Four (AQ = 0). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel penelitian lebih banyak menggunakan jasa KAP non-Big Four.

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Family Ownership* (FAM) memiliki koefisien sebesar 0,008 dengan nilai signifikansi 0,316 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Family Ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Karlina et al. \(2023\)](#), artinya perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena jika tindakan tersebut terungkap, hal itu dapat menurunkan nilai perusahaan dan merusak reputasi keluarga pemilik. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang besar umumnya berupaya untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan beban pajak yang berlaku ([Karlina et al., 2023](#)).

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Institutional Ownership* (INS) memiliki koefisien sebesar 0,003 dengan nilai signifikansi 0,740 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Institutional Ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Rakayana et al. \(2021\)](#), [Yusri et al. \(2022\)](#), [Ramdiani et al. \(2023\)](#) & [Prawaati et al. \(2024\)](#) karena sebagian besar investor institusional lebih menitikberatkan perhatian pada stabilitas nilai investasi serta kinerja keuangan jangka panjang, daripada pada intervensi langsung terhadap kebijakan pajak perusahaan ([Prawaati et al., 2024](#)).

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Managerial Ownership* (MAN) memiliki koefisien sebesar -0,014 dengan nilai signifikansi 0,312 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05),

sehingga dapat disimpulkan bahwa *managerial Ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Arifin et al. \(2023\)](#) & [Prawaati et al. \(2024\)](#), hal ini menunjukkan pemegang saham manajerial memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai agen dan prinsipal. Kondisi ini dapat membantu manajer untuk mengendalikan diri dari mencari keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut dapat berdampak pada penurunan nilai saham yang mereka miliki apabila kepercayaan investor lain menurun ([Arifin et al., 2023](#)).

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Government Ownership* (GOV) memiliki koefisien sebesar -0,023 dengan nilai signifikansi 0,524 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Government Ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Arifin et al. \(2023\)](#), dengan demikian keberadaan kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan dapat membuat manajer menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama terkait potensi penghindaran pajak. Namun, kehati-hatian tersebut bukan semata karena pengawasan, melainkan karena pemerintah juga memiliki harapan untuk memperoleh keuntungan dari investasinya ([Arifin et al., 2023](#)).

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Profitability* (PRO) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,422 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Widyastuti et al. \(2022\)](#) & [Arifin et al. \(2023\)](#), yang menunjukkan semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak ([Arifin et al., 2023](#)).

Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Koefisien

Variable	B	t	Sig.	Kesimpulan
FAM	0,008	1,005	0,316	
INS	0,003	0,333	0,740	Ha <sub>1</sub> tidak dapat diterima
MAN	-0,014	-1,013	0,312	Ha <sub>2</sub> tidak dapat diterima
GOV	-0,023	-0,638	0,524	Ha <sub>3</sub> tidak dapat diterima
PRO	0,422	10,193	0,000	Ha <sub>4</sub> tidak dapat diterima
LEV	0,025	2,423	0,016	Ha <sub>5</sub> dapat diterima
AQ	0,009	1,620	0,106	Ha <sub>6</sub> dapat diterima
(Constant)	-0,012	-1,189	0,235	Ha <sub>7</sub> tidak dapat diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Leverage* (LEV) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,025 dengan nilai signifikansi 0,016 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Wulandari et al. \(2022\)](#), [Widyastuti et al. \(2022\)](#) & [Paramita et al. \(2023\)](#), Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak karena beban bunga atas utang dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Semakin besar jumlah utang dan biaya bunga yang ditanggung, semakin kecil beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dengan demikian, peningkatan leverage menjadi salah satu strategi perusahaan untuk menghemat pajak ([Paramita et al., 2023](#)).

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa *Audit Quality* (AQ) memiliki koefisien sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi 0,106 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Audit Quality* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [Pandapotan et al. \(2024\)](#), [Prawaati et al. \(2024\)](#) & [Ramdiani et al. \(2023\)](#), karena auditor yang berasal dari KAP Big Four maupun non-Big Four memiliki pedoman dan keahlian yang sama dalam melakukan audit

serta memiliki kemampuan untuk mendeteksi perilaku kecurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam laporan keuangan perusahaan. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan peraturan dan standar tidak akan memengaruhi apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak, setra Auditor juga dituntut untuk mematuhi kode etik profesinya guna menjaga integritas mereka ([Pandapotan et al., 2024](#)).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Family Ownership*, *Institutional Ownership*, *Managerial Ownership*, *Government Ownership*, *Profitability*, *Leverage*, dan *Audit Quality* terhadap *Book Tax Difference* (BTD). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Family Ownership*, *Institutional Ownership*, *Managerial Ownership*, *Government Ownership*, dan *Audit Quality* tidak berpengaruh terhadap BTD. Temuan ini sebagian konsisten dan sebagian tidak konsisten dengan penelitian terdahulu. Sementara itu, *Profitability* dan *Leverage* terbukti berpengaruh terhadap BTD, yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan dan struktur pendanaan perusahaan memiliki peran dalam perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Secara keseluruhan, hasil

penelitian menunjukkan bahwa faktor keuangan lebih dominan memengaruhi BTD dibandingkan struktur kepemilikan dan kualitas audit pada perusahaan manufaktur selama periode penelitian.

Adapun beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: (1) Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat yaitu selama 3 periode (2022-2024) sehingga hanya terdapat 299 populasi yang mana setelah dilakukan sampling berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan menjadi 145 populasi atau 435 data. (2) Populasi pada penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2022-2024. (3) Penelitian hanya menggunakan tujuh variabel independen, sedangkan masih banyak variabel lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen *Book Tax Difference*. (4) Dalam uji normalitas, data tidak terdistribusi normal walaupun sudah dilakukan uji outlier. (5) terdapat uji asumsi klasik yang tidak terpenuhi yaitu variabel *Family Ownership*, *Profitability* dan *Audit Quality* yang tidak memenuhi uji heteroskedastisitas. (6) Terdapat autokorelasi dalam uji autokorelasi artinya ketidak berkaitan antar residual tidak terpenuhi.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang telah diuraikan di atas maka rekomendasi yang dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait *Book tax difference* sehingga dapat ditemukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut: (1) Memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian akan lebih mencerminkan hasil penelitian jangka panjang dan kondisi perusahaan sebenarnya. (2) Memperluas objek penelitian dengan menambahkan sektor maupun industri lain sebagai populasi, sehingga tersedia lebih banyak data yang dapat dianalisis. (3) Menambahkan variabel-variabel independen baru yang diharapkan dapat memberikan pengaruh akan tinggi rendahnya *Tax Avoidance* seperti *ETR*, *Firm Size* dan *Liquidity*. (4) Dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan cara transformasi data. (5) Dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi data. (6) Dapat mengatasi masalah autokorelasi dengan cara menerapkan *heteroscedasticity and autocorrelation robust standard error* agar nilai p value dapat lebih akurat.

## REFERENSI

- Andriyanto, T. and Marfiana, andri, Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 178–96, June 25, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Anggreini, G. M. and Kusuma, H., The Influence of Ownership Structure and Political Connections on Tax Avoidance in Indonesia, *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), vol. 13, no. 4, pp. 324–34, June 11, 2024. DOI: 10.20525/ijrbsv13i4.3392
- Arifin, Y. nur, Nurrahmawati, A. and Perwitasari, D., Does Ownership Structure Affect Tax Avoidance?, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, vol. 23, no. 1, pp. 44–60, from [www.jab.fe.uns.ac.id](http://www.jab.fe.uns.ac.id), February 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v23i1.1005>
- Asalam, A. G. and Kamilah, I. J., The Influence of Profitability, Leverage, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX in 2017-2020), *Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, vol. 3, pp. 4220–29, September 2022.

- Firmansyah, M. Y. and Bahri, S., Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, vol. 6, no. 3, pp. 430–39, 2022. DOI: 10.23887/jppsh.v6i3.53401
- Gaaya, S., Lakhal, N. and Lakhal, F., Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality, *Managerial Auditing Journal*, vol. 32, no. 7, pp. 731–44, September 25, 2017. DOI: 10.1108/MAJ-02-2017-1530
- Jensen, M. C., and Meckling, W. H., Also Published in *Foundations of Organizational Strategy*, Journal of Financial Economics, Harvard University Press, 1976.
- Karlina, L. and Kharisma Utami, C., Family Ownership, Prudence and Tax Avoidance, *Jurnal Ilmiah MEA*, vol. 7, no. 3, p. 2023, accessed September 26, 2025, from <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>, 2023. DOI: <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Najihah, N., Winarsih and Mutoharoh, The Role of Ownership Structure on Corporate Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Company in Indonesia, *Jurnal Manajemen Bisnis*, vol. 11, no. 2, pp. 1097–1110, August 2024. DOI: <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.905>
- Pandapotan, F., Oktavianthie, N. and Setiany, E., Board Characteristics, Audit Quality and CEO Narcissism on Tax Avoidance: Evidence from Consumer Staples in Indonesia and Australia, *Review of Integrative Business and Economics Research*, vol. 13, no. 3, p. 322, from <https://www.researchgate.net/publication/374776355>, 2024.
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A. and Dzulfikar, A., The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance, *Accounting Analysis Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 186–95, April 17, 2023. DOI: 10.15294/aaj.v11i3.61617
- Prawaati, F. N. and Narulitasari, D., Interaction Of Ownership Structure And Audit Quality On Corporate Tax Avoidance, *\_roxeedings of The Iqtishaduna International Conference 2024*, vol. 1, pp. 211–16, from <https://iqtishaduna.com/proceedings/index.php/iicp>, 2024.
- Rakayana, W., Sudarma, M. and Rosidi, R., Structure of Company Ownership and Tax Avoidance in Indonesia, *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, vol. 8, no. 3, pp. 296–305, May 10, 2021. DOI: 10.21744/irjmis.v8n3.1696
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T. and Lestari, E. P., Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance, *Owner*, vol. 7, no. 2, pp. 1283–93, April 1, 2023. DOI: 10.33395/owner.v7i2.1367
- Saleh, M., Zahirdin, G. and Octaviani, E., Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence from Property and Real Estate Public Companies in Indonesia, *Investment Management and Financial Innovations*, vol. 14, no. 2, pp. 252–63, 2017. DOI: 10.21511/imfi.14(2-1).2017.10
- Saragih, A. H., Raya, M. N. and Hendrawan, A., The Moderating Role of Firm Size on the Association between Managerial Ability and Tax Avoidance, *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, vol. 13, no. 1, pp. 39–49, July 1, 2021. DOI: 10.17509/jaset.v13i1.30783
- Sonia, S. and Suparmun, H., Factors Influencing Tax Avoidance, *Advances in Economics, Business and Management Research.*, vol. 73, pp. 238–43, 2019.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I. and Candrakanta, A. B., The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance Pandemic, *Integrated Journal of Business and Economics*, vol. 5, no. 3, pp. 13–27, February 28, 2022. DOI: 10.33019/ijbe.v5i3.334
- Wulandari, P. and Sudarma, M., The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia, *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 206, pp. 228–34, January 28, 2022. DOI: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030>.
- Yusri, N., Wibawani, S., Astuti, W., Irawan, D. and Juanda, A., Ownership Structure And Tax Avoidance: Empirical Study On Manufacturing Companies, 2022. DOI: 10.21070/jbmp.v8vi2.1596.